



IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK DAN PROFIL KEMISKINAN DI PULAU LOMBOK: BASIS PERUMUSAN INTERVENSI KEBIJAKAN

Embun Suryani*, Lalu Adi Permadi, dan Sarifudin Serif
*Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62 Mataram*

Kata Kunci

Kemiskinan,
Fenomena Sosial,
Kebijakan

Abstrak

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Pulau Lombok. Di lain sisi program penanggulangan kemiskinan diduga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap indikator-indikator kemiskinan. Tulisan ini mencoba menggambarkan dan mendeskripsikan karakteristik kemiskinan dilihat dari gambaran umum kemiskinan, karakteristik wilayah dan akses infrastruktur. Fokus utama dari penelitian ini adalah karakteristik dan profil rumah tangga dan penduduk miskin di desa termiskin di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil analisis data dapat dirumuskan dua aspek bagi penanggulangan kemiskinan di wilayah penelitian. Pertama, dilakukan melalui pemantapan pada tahap transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan lanjutan melalui perbaikan akses, ketersediaan infrastruktur pendidikan khususnya bagi wilayah miskin, dan peningkatan akses kesehatan dan perbaikan kualitas pelayanan di tingkat puskesmas. Kedua dilihat dari akses sumber daya dan infrastruktur wilayah miskin perlu dipertimbangkan beberapa pendekatan program penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1) perbaikan lingkungan, karena seringkali penduduk miskin merupakan korban sekaligus agen kerusakan lingkungan; 2) meningkatkan akses air bersih serta perbaikan sanitasi bagi penduduk miskin; 3) memperluas akses lahan bagi penduduk miskin; 4) reformasi pertanian dan ekonomi yang berpihak bagi penduduk miskin.

*Korespondensi: Embun Suryani
Email: embunsuryani@unram.ac.id*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia. Fenomena kemiskinan terjadi karena suatu ketidakadilan, filosof terkemuka Karl Mark berpendapat bahwa kemiskinan tercipta karena akibat dari ulah kapitalis dalam masyarakat melalui proses eksploitasi. Penyebab kemiskinan dapat dihubungkan dengan dimensi

sosial, ekonomi, dan budaya, karenanya penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan karena sebab-sebab alami (kemiskinan natural), kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural (Latifah, 2011). Beberapa ahli berpendapat bahwa kemiskinan terjadi disebabkan oleh kultur/budaya yakni rendahnya etos kerja, ketidakadilan dalam kepemilikan faktor produksi, dan karena model

pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Sutrisno, 2007).

1. Jaminan hidup layak merupakan kewajiban pemerintah yang diberikan kepada warga negaranya. Perhatian pemerintah terhadap rakyatnya ialah melalui kebijakan publik yang akan berdampak pada perubahan secara umum terhadap keseluruhan rakyatnya. Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu bentuk isu bersama yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan suatu warga. Oleh karena itu berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin.
2. Pemahaman karakteristik dan profil kemiskinan di suatu wilayah sangat penting dan strategis dalam upaya untuk melakukan analisis mendalam terkait permasalahan teknis, ekonomi dan sosial penduduk miskin. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan. Kebijakan tersebut dapat mencakup berbagai aspek dari konteks kemiskinan tersebut, misalnya pendekatan dan strategi pengentasan kemiskinan, serta pemantapan target sasaran secara spasial dan kelompok miskin. Sebuah karakteristik kemiskinan membutuhkan jawaban dari pertanyaan seperti: siapakah orang miskin itu; dimana mereka tinggal; di sektor apa mereka bekerja; apa tingkat pendidikan yang mereka selesaikan dan karakteristik apa yang membedakan orang miskin dengan orang tidak miskin. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan identifikasi kemiskinan dalam hal variabel sosial ekonomi seperti lokasi rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, ukuran keluarga, jender kepala rumah tangga, status pekerjaan, sektor pekerjaan, dan kondisi lingkungan perumahan rumah tangga. (Hondai, 2005).
3. Permasalahan kemiskinan di Pulau Lombok termasuk permasalahan yang tidak mudah untuk diatasi dikarenakan kompleksnya faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut. Jumlah penduduk miskin di Pulau Lombok

pada tahun 2015 mencapai 602,47 ribu orang, sedangkan jumlah individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah mencapai 928,75 ribu orang (BPS NTB, 2016). Rata-rata indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten/Kota di pulau Lombok pada tahun 2014 adalah 3.43, dimana pada tahun 2015 indeks ini meningkat menjadi 3.66. Berdasarkan data kemiskinan tersebut perlu diidentifikasi karakteristik dan profil kemiskinan di Pulau Lombok. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) mengidentifikasi sumber-sumber mata pencaharian masyarakat di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi; 2) mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin di Pulau Lombok; dan 3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Sedangkan, menurut Abraham dan Kumar (2008) kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan, yang mana kekurangan tersebut tidak hanya pada pendapatan namun juga kekurangan dalam dimensi lain seperti kesehatan, nutrisi dan sanitasi. Beberapa riset (Haughton dan Khandker, 2009) mengungkapkan bahwa keluarga dianggap miskin jika tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan).

Haughton dan Khandker (2009) mengungkapkan bahwa orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan yang cukup atau konsumsi yang cukup untuk memenuhi batas kebutuhan minimumnya. Sebenarnya masalah kemiskinan terbentuk dari adanya ketidakadilan distribusi. Kondisi inilah yang berdampak pada kemampuan individu, rumah tangga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang terbagi dalam beberapa dimensi yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, makanan/nutrisi, akses terhadap sanitasi dan kualitas air yang baik, pekerjaan, perumahan, akses terhadap aset produktif, akses terhadap pasar, dan partisipasi sosial (Asselin, 2009).

Mengacu pada definisi kemiskinan, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi kehidupan yang sangat kompleks. Kemiskinan juga berhubungan dengan ketimpangan. Ketimpangan fokus pada distribusi seperti pendapatan atau konsumsi. Maka, dengan mengetahui pemahaman atas definisi kemiskinan, suatu kondisi yang dinamakan miskin, konteks kemiskinan, identifikasi terhadap sebab-sebab kemiskinan dan penelitian sebelumnya tentang penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu menciptakan suatu formulasi kebijakan yang komprehensif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Klasifikasi Kemiskinan Masyarakat

Klasifikasi dan jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat pada umumnya adalah:

- a. Kemiskinan absolute, yaitu keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum;
- b. Kemiskinan relative, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya;
- c. Kemiskinan struktural yaitu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan;
- d. Kemiskinan kultural yaitu budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin.

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Para ahli menyatakan penyebab kemiskinan bersifat multidimensi, karena tidak hanya bersumber dari faktor internal, namun juga dari faktor eksternal penduduk miskin. Ada yang menyatakan bahwa penyebab kemiskinan terdiri dari faktor struktural dan kultural. Suyanto (1995) yang menyadur pendapat Wignjosubroto, memberikan definisi kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Struktur atau tatanan kehidupan yang seperti itu tidak hanya dapat menimbulkan kemiskinan, namun juga melanggengkan kemiskinan. Hal ini berarti jika seseorang atau keluarga berada dalam struktur kehidupan itu, maka akan sangat susah untuk keluar dari belenggu tersebut tanpa bantuan pihak lain. Kemiskinan struktural juga berkaitan dengan distribusi sumberdaya yang timpang. Penduduk

yang memiliki sumberdaya tidak akan mengalami kemiskinan, namun sebaliknya mereka yang tidak memilikinya akan berada dalam kondisi miskin. Penyebab struktural ini berkaitan dengan tatanan sosial yang tidak adil, bukan karena sebab-sebab alami atau pribadi. Tatanan dimana terdapat ketidakadilan didalamnya, mengakibatkan sebagian masyarakat yang mengalaminya tidak memiliki akses atau gagal dalam mendapatkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contoh nyata adalah masyarakat yang hidup di daerah terpencil atau terisolir yang miskin akibat tempat tinggalnya yang terisolir (BPS, 2005).

Di sisi lain, kemiskinan kultural diakibatkan oleh factor-factor adat dan budaya suatu daerah yang membelenggu seseorang, sehingga mengakibatkan dia tetap miskin. Hal ini berarti faktor adat dan budaya dapat menghalangi seseorang untuk melakukan perubahan-perubahan guna keluar dari belenggu kemiskinan. Sumber daya nonfisik seperti motivasi-tekad untuk keluar dari belenggu kemiskinan tersebut, menjadi sangat penting. Barangkali,tekad atau motivasi untuk keluar dari belenggu kemiskinan yang lebih penting daripada sumber daya fisik yang dimiliki. Pemahaman atau keyakinan bahwa kemiskinan adalah sebuah 'takdir',atau setiap orang sudah memiliki suratan nasib yang harus diterima, menyebabkan nihilnya atau rendahnya usaha-usaha yang dilakukan untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Pada kelompok masyarakat seperti ini, peran pemerhati masalah kemiskinan, selain pemerintah, menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran tentang kekuatan yang ada pada diri, bukan bantuan dari orang lain, untuk keluar dari kondisi kemiskinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan;

dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Penyebab kemiskinan yang lain menurut Cox (2004:1-6) berupa: (1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi berupa dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang; (2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan berupa rendahnya partisipasi dalam pembangunan dan peminggiran proses pembangunan; (3) Kemiskinan sosial yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas karena ketidakberdayaan mereka; dan (4) Kemiskinan karena faktor-faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Sedangkan Sharp et. al. dalam Kuncoro (2004:157) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Penyebab kemiskinan menurut masyarakat miskin sendiri adalah kurangnya modal, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja; dan rendahnya pendapatan (Tim Studi KKP, 2004).

Sahdan (2005) mengemukakan penyebab kemiskinan di desa yang hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan dimana 60% penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Penyebab utama kemiskinan desa adalah: (1) pendidikan yang rendah; (2) ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian; (3) ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; (4) alokasi anggaran kredit yang terbatas; (5) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar; (6) pengelolaan ekonomi secara tradisional; (7) rendahnya produktivitas dan pembentukan modal; (8) budaya menabung yang belum berkembang; (9) tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa; dan (10) rendahnya jaminan kesehatan.

Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan tetapi juga mengukur tingkat kerentanan (*vulnerability*) atau kerawanan individu atau kelompok masyarakat untuk menjadi miskin. Yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang

tingkat pengeluarannya berada relatif sedikit lebih tinggi dari garis kemiskinan. Penduduk kategori ini rentan dengan adanya *shock* dalam perekonomiannya. *Shock* perekonomian seperti banjir, adanya anggota keluarga yang sakit terutama kepala keluarga, dan sejenisnya dapat menyebabkan penduduk rentan ini menjadi miskin.

Kemiskinan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satu indikator kuantitatif dari kemiskinan antara lain adalah tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat konsumsi rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan indikator kualitatif antara lain adalah tingkat pendidikan, kondisi rumah yang dihuni, dan sebagainya. Menurut Haughton dan Khandker (2009), pendekatan kemiskinan secara menyeluruh berfokus pada kapabilitas individu terhadap fungsinya dalam masyarakat. Secara umum orang miskin kurang memiliki kapabilitas. Mereka tidak memiliki pendapatan, pendidikan, kesehatan yang cukup atau kurang memiliki kebebasan politik. Oleh karena itu pengukuran kemiskinan penting untuk dilakukan. Terdapat empat alasan untuk mengukur kemiskinan (Haughton dan Khandker, 2009): 1) penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda dalam pembangunan; 2) untuk mengidentifikasi individu atau kelompok masyarakat miskin sehingga target dari intervensi kebijakan yang *pro poor* dapat tercapai; 3) untuk melakukan monitor dan evaluasi atas intervensi kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan; dan 4) untuk melakukan evaluasi atas efektifitas kelembagaan yang menjalankan program pengentasan kemiskinan.

Langkah utama untuk mengukur kemiskinan adalah mendefinisikan sebuah indikator kesejahteraan seperti pendapatan per kapita atau konsumsi per kapita. Secara prinsipnya pendapatan adalah konsumsi ditambah dengan perubahan dalam kekayaan suatu individu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam *permanent income hypothesis* konsumsi dapat mengukur pendapatan permanen. Karena, konsumsi suatu individu dipengaruhi oleh pendapatan permanennya. Oleh karena itu pengukuran kesejahteraan melalui nilai konsumsinya adalah layak dilakukan.

Menurut Ravallion (1998), terdapat tiga langkah untuk mengukur kemiskinan. Pertama, seperti telah dijelaskan sebelumnya yaitu mendefinisikan sebuah indikator kesejahteraan. Kedua, menetapkan standar

minimum kehidupan individu, yaitu kebutuhan minimal seorang individu yang harus dipenuhi, selanjutnya disebut garis kemiskinan. Ketiga adalah membuat deskripsi data sebagai informasi agregat dari garis kemiskinan suatu masyarakat yang menjadi kajian.

METODE PENELITIAN

Lokasi Kajian

Lokasi kajian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Lokasi kajian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan mengambil tiga Kabupaten/Kota yang tergolong kategori paling miskin berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2015. Untuk itu ditentukan lokasi kajian di Kabupaten Lombok Utara sebagai Kabupaten/Kota dengan indeks kedalaman kemiskinan paling tinggi di Pulau Lombok yaitu 7,5; kemudian Kabupaten Lombok Timur dengan indeks kedalaman kemiskinan yaitu 3,36; dan terakhir Kabupaten Lombok Tengah dengan indeks kedalaman kemiskinan yaitu 3.

Dari tiga Kabupaten/Kota yang dipilih tersebut akan dipilih satu desa daerah masing-masing daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi (berada pada kategori Desil 1). Di Kabupaten Lombok Utara akan dipilih desa Sesait, kemudian di Kabupaten Lombok Tengah dipilih desa Mangkung, dan di Kabupaten Lombok Timur dipilih Desa Kotaraja.

Jenis Data dan Metodologi Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait, misalnya data dari BPS, Bappeda, dan lainnya. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan observasi di wilayah kajian. Kategori penduduk miskin ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS yaitu berdasarkan 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan kriteria rumah tangga miskin. Kedelapan variabel tersebut adalah :

1. Luas lantai per kapita <8m²
2. Jenis lantai adalah tanah
3. Air bersih berasal dari sumber yang tidak terlindung.

4. Tidak ada jamban/WC
5. Tidak memiliki aset
6. Pendapatan total kurang dari 333.996 per bulan (garis kemiskinan Provinsi NTB tahun 2016)
7. Persentase pengeluaran untuk makanan > 80% pendapatan
8. Konsumsi lauk pauk tidak ada/ walaupun ada tidak bervariasi

BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2008).

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat dan pemerintah pada level provinsi atau kabupaten/kota di Pulau Lombok seperti badan pusat statistik (BPS), badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dan kantor desa/kelurahan. Sedangkan data primer yang dikumpulkan meliputi mata pencaharian, indikator-indikator kemiskinan, bentuk-pentuk program pemerintah, serta jenis-jenis kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan dan lain-lain. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur yang saling terkait dengan wilayah riset. Fokus penelitian adalah kelompok penduduk miskin. Kelompok sasaran ditentukan berdasarkan pengenalan akan kondisi lapang dan informasi awal yang telah diperoleh dari informan kunci (*key informan*). Selanjutnya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi real di lapang, dilakukan dengan kuestioner dan wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan dokumentasi terhadap fakta-fakta penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kemiskinan di Lokasi Penelitian

Tabel 4.1 berikut menunjukkan jumlah penduduk miskin dan persentasenya dari tahun 2013-2015 di tiga Kabupaten di Pulau Lombok yang menjadi wilayah kajian.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentasenya dari Tahun 2013-2015 di Tiga Kabupaten Di Pulau Lombok

Kabupaten	2013		2014		2015	
	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Lombok Utara	75.000	34,63	72.000	34,27	72.280	34,13
Lombok Tengah	145.150	16,20	145.180	16,03	147.940	16,26
Lombok Timur	219.270	19,15	219.670	19,19	222.190	19,14

Sumber: <https://bps.go.id>

Penduduk miskin tersebut hidup dengan pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar makanan setara dengan 2.100 kkal sehari dan pengeluaran minimal untuk perumahan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan transportasi. Masalah kemiskinan juga ditandai oleh

rendahnya mutu kehidupan masyarakat. Berbagai indikator pembangunan manusia dan berbagai indikator kemiskinan manusia menunjukkan ketertinggalan ke tiga kabupaten ini dibandingkan daerah lain di Pulau Lombok.

Tabel 4.2. IPM wilayah kajian pada tahun 2015.

	KLU	Kab. Loteng	Kab. Lotim
IPM (%)	61,15	62,74	62,83
Angka Harapan Hidup (tahun)	65,59	64,75	64,44
Harapan lama sekolah (tahun)	12,34	12,81	13,12
Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,22	5,54	6,15
Daya beli (rupiah)	794.000	884.600	810.000
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	363 367	335 286	359 235

Sumber: <http://ntb.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/21>

Pengeluaran per kapita di setiap wilayah kajian berada diatas garis kemiskinan. Dimana, pengeluaran tersebut 44,5 % digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan sisanya untuk pengeluaran non makanan. Sedangkan bila dilihat dari Gambaran tentang perekonomian masing-masing wilayah dapat diketahui laju pertumbuhan

ekonominya, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut. Meskipun PDRB per kapita daerah masing-masing wilayah kajian cukup tinggi, namun jumlah keluarga/penduduk miskin yang individu dengan kondisi kesejahteraan terendah masih tergolong cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Pulau Lombok.

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2013-2015

	KLU	Kab. Loteng	Kab. Lotim	NTB
2013	4,11	6,24	5,51	5,16
2014	4,59	6,28	4,79	5,17
2015	4,73	5,58	5,94	21,77

Sumber: <http://ntb.bps.go.id>

Kondisi Kemiskinan Desa Sesait

Jumlah individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di desa Sesait pada tahun 2015 adalah 4.248 jiwa. Hasil

pentahapan Keluarga Sejahtera (KS) tahap pra sejahtera di desa Sesait pada tahun 2015 adalah sebanyak 760 kepala keluarga (KK), dimana 544 KK karena alasan ekonomi dan 216 KK bukan karena alasan ekonomi, sedangkan kepala keluarga yang termasuk KS 1 terdiri dari 288 KK, dimana 196

KK karena alasan ekonomi dan 92 KK bukan karena alasan ekonomi. Secara keseluruhan persentase KS pra sejahtera dan KS 1 di desa Sesait sebanyak 35 persen dari total KK di desa Sesait dan 11 persen dari total KK di Kecamatan Kayangan.

Sarana kesehatan di Desa Sesait yang ada meliputi 1 buah tempat praktek dokter. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari 1 orang dokter, 2 orang bidan dan 1 orang dukun bayi. Sarana pendidikan yang ada meliputi 6 buah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan 3 buah Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jumlah penduduk usia sekolah di Desa Sesait adalah sebanyak 880 jiwa, yang berarti 10% yang tidak sekolah. Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di Desa Sesait terdiri dari perdagangan dan industri makanan dan minuman.

Desa Sesait merupakan salah satu desa yang masuk dalam lingkaran Rinjani. Desa ini merupakan desa di kaki Gunung Rinjani yang potensial untuk perkebunan dan pertanian. Namun seiring perjalanan waktu, persoalan muncul cengkeh yang menjadi primadona di Desa Sesait dan sekitarnya berangsur-angsur tua dan menurun potensinya untuk berbuah. Di sisi lain aturan perundangan-undangan yang mengurangi pemasaran rokok berdampak pada permintaan cengkeh dari Desa Sesait. Dapat dikatakan bahwa sektor perkebunan ini belum mampu optimal dalam memberdayakan masyarakat.

Digambarkan dalam bagian sebelumnya bahwa banyak perkebunan yang belum tersentuh dan masyarakat mayoritas berprofesi sebagai buruh serabutan. Hal ini mengakibatkan jumlah keluarga miskin nomor dua tertinggi di Lombok Utara. Sedangkan, gambaran kondisi kemiskinan dapat dilihat dari jumlah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1, yaitu berjumlah 1.062 KK (36%) dengan jumlah 4248 jiwa (50%).

Kondisi Kemiskinan Desa Mangkung

Jumlah individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di desa Mangkung pada tahun 2015 adalah 4.665 jiwa. Hasil pentahapan Keluarga Sejahtera (KS) tahap pra sejahtera di desa Mangkung pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.498 KK, dimana 1.072 KK karena alasan ekonomi dan 426 KK bukan karena alasan ekonomi. Sedangkan yang termasuk KS 1 terdiri dari 1.267 KK, dimana 862 KK karena alasan ekonomi dan 405 bukan karena alasan ekonomi. Sedangkan persentase

KS pra sejahtera dan KS 1 di desa Mangkung sebanyak 67,44 persen dari total KK di desa Mangkung dan 14,85 persen dari total KK di Kecamatan Praya Barat.

Sarana kesehatan yang ada meliputi 16 buah Posyandu dan 1 buah poskesdes. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari 1 orang dokter, 1 dokter gigi, 4 orang bidan dan 16 orang dukun bayi. Sarana pendidikan yang ada meliputi 2 buah Taman Kanak-Kanak Swasta, 8 buah SD Negeri, dan 1 buah SMP Negeri. Jumlah penduduk usia sekolah adalah sebesar 1.654 jiwa, hanya 8,8% yang tidak sekolah. Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di Desa Mangkung terdiri dari 22 UKM gerabah/keramik/batu, 9 UKM bergerak di industri kayu, dan 8 UKM yang bergerak di industri makanan dan minuman.

Desa Mangkung merupakan salah satu desa yang masuk dalam lingkaran Lombok Selatan. Di mana desa-desa yang terletak di wilayah ini beberapa tahun yang lalu dikenal sebagai daerah tandus yang identik dengan kemiskinan, kelaparan dan keterbelakangan. Namun seiring perjalanan waktu, adanya pembangunan dam dan bendungan setidaknya dapat mengurangi permasalahan diatas. Di Desa Mangkung, meskipun sektor pertanian sebagai salah satu sumber pencaharian sebagian besar penduduk, tetapi sektor ini belum mampu terangkat secara optimal. Sedangkan, gambaran kondisi kemiskinan dapat dilihat dari jumlah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1, yaitu berjumlah 1.308 KK (41%) dengan jumlah 4663 jiwa (42%).

Kondisi Kemiskinan Desa Kotaraja

Jumlah individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di desa Kotaraja pada tahun 2015 adalah 4.391 jiwa. Hasil pentahapan Keluarga Sejahtera (KS) tahap pra sejahtera di desa Kotaraja pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.359 KK, dimana 1689 KK karena alasan ekonomi dan 670 KK bukan karena alasan ekonomi. Dari jumlah masyarakat miskin di Desa Kotaraja yang termasuk Keluarga Sejahtera 1 terdiri dari 1.465 KK, dimana 997 KK karena alasan ekonomi dan 468 bukan karena alasan ekonomi, sedangkan persentase KS pra sejahtera dan KS 1 di desa Kotaraja sebanyak 92 persen dari total KK di desa Kotaraja dan 20 persen dari total KK di Kecamatan Sikur.

Sarana kesehatan yang ada meliputi 1 unit rumah bersalin, 1 unit puskesmas, 1 buah klinik praktek dokter, 1 buah toko obat dan 13 unit pos pelayanan terpadu (posyandu). Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari 3 orang dokter, 3 orang paramedis, 3 orang bidan dan 3 orang dukun bersalin. Sarana pendidikan yang ada meliputi 2 buah Taman Kanak-Kanak Swasta, 6 buah SD Negeri, 1 buah SD swasta dan 1 buah SMP Swasta. Jumlah penduduk usia sekolah adalah sebesar 6330 jiwa atau 51% dari penduduk desa Kotaraja, dari 39% sedang menempuh pendidikan. Sementara itu 22 persen dari penduduk desa Kotaraja sudah tamat pendidikan di berbagai jenjang.

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di Desa Kotaraja berjumlah 154 unit usaha yang terdiri dari 7 UKM penggilingan padi, 13 UKM bergerak di industri kayu, 32 UKM yang bergerak di industri makanan dan minuman, 17 UKM industri tembakau, 14 UKM Meubel, 15 Industri Batu Bata, dan 6 UKM Industri Beton.

Desa Kotaraja merupakan desa yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi di Kecamatan Sikur. Dengan luas 3,50 km persegi dan penduduk 12.314 jiwa maka tingkat kepadatan di desa tersebut adalah 3.518 jiwa/km persegi (BPS, 2015). Di Desa Kotaraja, meskipun sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu sumber pencaharian sebagian besar penduduk, namun sektor ini belum dapat secara maksimal mengangkat ekonomi masyarakat mengingat tingkat kepemilikan lahan tidak merata. Hal ini menyebabkan 14 persen penduduk desa Kotaraja berprofesi sebagai buruh industri kerajinan, 3 persen sebagai petani penggarap dan 30 persen buruh tani. Di sisi lain ekonomi berputar di 23 persen penduduk yang menjadi petani pemilik lahan. Ini menyebabkan kemiskinan masih banyak didapatkan di Desa Kotaraja. Secara keluruhan, gambaran kondisi kemiskinan dapat dilihat dari jumlah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1, yaitu berjumlah 1.098 KK (27%) dengan jumlah 4.391 jiwa (36%).

Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Wilayah Kajian

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketertinggalan daerah/wilayah di Pulau Lombok umumnya adalah (1) Faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari variabel tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja, (2) Faktor

kondisi infrastruktur sosial yang terdiri dari variabel tingkat pelayanan sarana pendidikan, tingkat pelayanan sarana kesehatan dan kondisi perumahan, (3) Faktor kondisi perekonomian wilayah yang terdiri dari variabel kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, dan PDRB perkapita, dan (4) Faktor kondisi infrastruktur ekonomi yang terdiri dari variabel kondisi jalan mantap/baik, tingkat pelayanan sarana perdagangan, tingkat pelayanan prasarana listrik, dan tingkat pelayanan prasarana air. Karakteristik ketiga wilayah kajian, secara umum memiliki karakteristik yang sama, yaitu:

- Memiliki potensi alam yang sangat bernilai untuk mengembangkan industri pariwisata
- Memiliki kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan
- Infrastruktur fisik belum mendukung untuk mengembangkan industri pariwisatanya, contohnya misalnya jalan menuju daerah wisata, fasilitas-fasilitas umum di daerah wisata, penanganan sampah terutama di daerah wisata, dan lain sebagainya.
- Mayoritas masyarakat miskin di daerah kajian bekerja sebagai buruh, terutama buruh tani, dimana penghasilan yang diperoleh dari mata pencaharian ini tidak mampu menutupi kebutuhan hidup sehari-hari

Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan hasil survey, ditunjukkan bahwa karakteristik kunci dari rumah tangga miskin di Lombok Utara adalah:

1. Kepala keluarga tidak tamat sekolah dasar
2. Kepala keluarga sebagian besar bekerja sebagai pekerja serabutan
3. Jumlah tanggungan lebih dari 3 orang
4. Pengeluaran untuk makanan rata-rata Rp.300.000,- per bulan
5. Rata-rata pengeluaran keseluruhan Rp. 520.000,-
6. Kesulitan untuk menyediakan makanan
7. Kesulitan dalam membeli beras
8. Rumah tidak layak huni
9. Tidak punya lahan garapan
10. Sebagian besar bergantung pada tetangga baik untuk sumber air minum maupun tempat buang air milik tetangga

Karakteristik tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga miskin di Lombok Utara. Jumlah tanggungan di atas tiga yang tidak ditunjang oleh penghasilan yang memadai mengakibatkan kesulitan menyediakan kebutuhan minimal untuk rumah tangga. Hal ini diperparah dengan tidak adanya lahan garapan padahal di sisi lain mereka hidup di daerah agraris. Kondisi rumah yang tidak layak huni dan sempit membuat anggota rumah tangga miskin rentan terhadap persoalan kesehatan. Rumah tangga miskin di Lombok Utara sebagian besar bergantung pada belas kasihan tetangga.

Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk dan PDRB perkapita beberapa kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dikategorikan sebagai kecamatan yang tertinggal, yaitu: Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Janapria, Kecamatan Kopang, Kecamatan Praya tengah, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Batukliang dan Kecamatan Batukliang Utara. Kecamatan-Kecamatan tersebut termasuk dalam kecamatan tertinggal karena memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Lombok Tengah. Rendahnya kedua indikator ini menyebabkan kecamatan-kecamatan tersebut cenderung tertinggal dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Lombok Tengah.

Karakteristik kecamatan yang tergolong tertinggal bila dilihat dari aspek sosial adalah memiliki ketertinggalan tingkat pendidikan sedang, ketertinggalan tenaga kerja tinggi, ketertinggalan tingkat pelayanan sarana pendidikan sedang, ketertinggalan tingkat pelayanan sarana kesehatan tinggi dan ketertinggalan kondisi perumahan tinggi.

Kecamatan yang termasuk tertinggal berdasarkan aspek ekonomi memiliki karakteristik yaitu persentase keluarga miskin tinggi, ketertinggalan pertumbuhan ekonomi kecamatan rendah, ketertinggalan pendapatan perkapita sedang, ketertinggalan tingkat pelayanan air bersih sedang, ketertinggalan kondisi jalan mantap tinggi, ketertinggalan tingkat pelayanan prasarana listrik tinggi dan ketertinggalan tingkat pelayanan sarana perdagangan tinggi.

Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Lombok Timur

Selanjutnya karakteristik kunci dari rumah tangga miskin di Lombok Timur adalah:

1. Kepala keluarga tidak tamat sekolah dasar
2. Kepala keluarga sebagian besar bekerja sebagai pekerja serabutan
3. Jumlah tanggungan lebih dari 3 orang
4. Pengeluaran untuk makanan rata-rata Rp.440.000,- per bulan
5. Rata-rata pengeluaran keseluruhan Rp. 700.000,-
6. Kesulitan untuk menyediakan makanan
7. Kesulitan dalam membeli beras
8. Rumah tidak layak huni
9. Tidak punya lahan garapan
10. Sebagian besar buang air di sungai

Karakteristik tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga miskin di Lombok Timur. Jumlah tanggungan dan pengeluaran yang besar tidak disertai dengan kemampuan ekonomi yang memadai, sehingga terjadi kesulitan menyediakan makanan dan beras untuk rumah tangga. Hal ini diperparah dengan tidak adanya lahan garapan padahal di sisi lain mereka hidup di daerah agraris. Kondisi yang membuat anggota rumah tangga miskin memiliki tingkat kenyamanan yang rendah adalah kondisi rumah yang tidak layak huni mengingat rata-rata rumah masih dipleseter kasar demikian juga untuk lantainya. Sebagian rumah tangga miskin memiliki lantai tanah dan tidak memiliki jamban sehingga harus buang air besar di sungai.

Karakteristik Penyebab Kemiskinan

Berdasarkan hasil survey, ditunjukkan bahwa karakteristik penyebab kemiskinan adalah: 1) kegagalan pemenuhan hak dasar terkait dengan terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, dan terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; 2) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; 3) terbatasnya akses layanan perumahan; 4) terbatasnya akses terhadap air bersih dan aman, serta sanitasi; 5) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; 6) memburuknya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 7) kurangnya keamanan dan

ketertiban umum; 8) lemahnya partisipasi; dan 9) ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi masalah bagi masyarakat miskin. Terbatasnya kecukupan dan kelayakan mutu pangan berkaitan dengan 1) rendahnya daya beli, 2) ketersediaan pangan yang tidak merata, 3) ketergantungan tinggi terhadap beras dan terbatasnya diversifikasi pangan. Di sisi lain, masalah yang dihadapi oleh petani penghasil pangan adalah terbatasnya dukungan produksi pangan, tata niaga yang tidak efisien, rendahnya penerimaan usaha tani pangan dan maraknya penyelundupan.

Sedangkan permasalahan kecukupan pangan antara lain terlihat dari 1) rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu; 2) pola konsumsi yang bertumpu pada beras sebagai bahan pangan pokok, menyebabkan ketergantungan masyarakat pada beras dan peralihan konsumsi pangan dari bukan beras menjadi beras; 3) perbedaan perlakuan dalam pengaturan dan pembagian makan antar anggota keluarga juga berpengaruh terhadap pemenuhan kecukupan pangan, yang dipengaruhi oleh perilaku dan budaya masyarakat yang mengutamakan bapak dan anak laki-laki lalu anak perempuan, dan terakhir ibu. Pola pengaturan makan seperti itu juga berdampak pada buruknya kondisi gizi ibu hamil, dan dapat mengakibatkan kematian ibu pada waktu melahirkan dan setelah melahirkan.

Masalah kecukupan pangan juga dialami oleh petani penghasil pangan termasuk petani padi, penyebab utamanya adalah: 1) fluktuasi harga yang terjadi pada saat musim panen dan musim paceklik yang tidak menguntungkan mereka; dan 2) impor beras yang dilakukan untuk menutup kebutuhan beras dan menjaga stabilitas harga seringkali tidak tepat waktu sehingga merugikan petani penghasil beras. Harga gabah ditingkat petani lebih rendah dari harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan

Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin, selain kecukupan pangan adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan

dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Salah satu indikator dari terbatasnya akses layanan kesehatan dasar adalah angka kematian bayi. Data BPS Lombok Tengah menunjukkan bahwa, jumlah kematian bayi pada tahun 2015 adalah sebanyak 201 orang, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 199. Di Kabupaten Lombok Utara angka kematian bayi pada tahun 2015 sebesar 82 kasus, dimana angka ini juga jauh lebih besar dibandingkan tahun 2014 sebesar 37 kasus. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2015 adalah 687 kasus, jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 697 kasus.

Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk dengan masih tingginya penyakit menular seperti malaria, dan tuberkulosis paru. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat miskin juga disebabkan oleh perilaku hidup mereka yang tidak sehat. Masalah lain adalah rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya sarana kesehatan. Pemanfaatan layanan kesehatan oleh kelompok masyarakat miskin umumnya jauh lebih rendah dibanding kelompok kaya. Umumnya masyarakat berpenghasilan rendah menggunakan layanan kesehatan berupa praktek petugas kesehatan dan praktek dokter, sedangkan praktek petugas kesehatan yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat miskin adalah bidan dan mantri yang lokasinya terdekat dari tempat tinggal mereka.

Salah satu keluhan utama masyarakat miskin adalah mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Hal ini disebabkan oleh jauhnya tempat pelayanan kesehatan dan rendahnya jaminan kesehatan. Penyebab utama rendahnya adalah ketidaktahuan tentang proses untuk memperoleh jaminan kesehatan dan kurang jelasnya pelayanan terhadap pemegang jaminan kesehatan.

Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan

Masyarakat miskin mempunyai akses yang rendah terhadap pendidikan formal dan non formal, disebabkan oleh 1) tingginya biaya pendidikan, 2) terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, 3) terbatasnya jumlah dan guru bermutu

di daerah dan komunitas miskin, 4) terbatasnya jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar, 5) terbatasnya jumlah SLTP di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong

kemiskinan, 6) terbatasnya jumlah, sebaran dan mutu program kesetaraan pendidikan dasar melalui pendidikan non formal.

Tabel 5.1. Angka Partisipasi Sekolah di Wilayah Kajian (%)

Kelompok Umur	Lombok Tengah	Lombok Utara	Lombok Timur
7 – 12	98,94	99,61	99,67
13 – 15	97,93	98,16	97,14
16 - 18	73,98	64,55	74,18

Sumber: BPS, 2016

Berdasarkan tabel di atas, angka putus sekolah pada pada kelompok umur 7-12 tahun terlihat presentasinya relatif kecil, akan tetapi semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditempuh maka semakin tinggi pula angka putus sekolah yang terjadi, kenyataan ini tidak terlepas dari akses ke sekolah semakin jauh sehingga diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk transportasi ke sekolah. Tingginya biaya pendidikan menyebabkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan menjadi terbatas.

Masalah lain yang dialami oleh siswa SD/MI terutama di daerah perdesaan adalah kekurangan kalori dan kekurangan gizi yang mengakibatkan rendahnya daya tahan belajar dan semangat belajar siswa. Dalam jangka panjang, hal

ini berpengaruh terhadap kemungkinan anak untuk putus belajar, mengulang kelas dan tidak mau sekolah.

Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya. Oleh karenanya tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana membina dan mendayagunakan tenaga kerja yang ada supaya menjadi modal dasar yang efektif dalam pembangunan. Sebagai ilustrasi berikut ditampilkan presentasi penduduk usia 15 tahun ke atas di sebagai berikut:

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Usian 15 Tahun Ke Atas Tahun 2014 (%)

Kabupaten	Angkatan Kerja		TPAK
	Bekerja	Mencari Kerja	
Lombok Utara	71,01	72,58	72,58
Lombok Tengah	62,41	67,41	92,58
Lombok Timur	60,04	64,19	93,54

Sumber: BPS, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan angka yang relatif besar kecuali Kabupaten Lombok Utara (KLU), dengan angka TPAK sebesar 72,58%. Hal ini berarti bahwa KLU memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan maka sektor pertanian masih memberikan kontribusi paling besar dalam menyerap tenaga kerja.

Tingginya jumlah pekerja yang bekerja di sektor kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan sehingga tergolong miskin atau tergolong pada pekerja dengan pendapatan yang rentan menjadi miskin (near poor). Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan.

Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah,

tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja yang berkelanjutan. Ketidakjelasan mengenai hak-hak mereka dalam bekerja menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka di lingkungan kerja. Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan koperasi dan usaha, mikro dan kecil (KUMK), karena 1) sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, karena sebagian besar masih lemah dalam kapasitas SDM, tidak adanya lembaga resmi yang dapat memberi modal dengan persyaratan yang dapat dipenuhi kapasitas masyarakat miskin; 2) hambatan untuk memperoleh ijin usaha; 3) kurangnya perlindungan dari kegiatan usaha; 4) rendahnya kapasitas kewirausahaan; 5) terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan-teknis dan teknologi; 6) masyarakat miskin juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terutama perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional, dan hilangnya aset usaha akibat pengusuran.

Terbatasnya akses layanan perumahan

Tempat tinggal yang sehat dan layak merupakan kebutuhan yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Secara umum, masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan atas pemilikan perumahan.

Karakteristik masyarakat miskin di wilayah kajian umumnya tinggal di kawasan nelayan, pinggir hutan, dan pertanian lahan kering, di mana mereka juga mengeluhkan kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Kesulitan perumahan dan permukiman masyarakat miskin di daerah perdesaan umumnya disiasati dengan menumpang pada anggota keluarga lainnya. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai.

Karakteristik tempat tinggal masyarakat miskin di wilayah kajian menunjukkan perkembangan kondisi perumahan, namun perkembangan tersebut sangat kecil, oleh karena itu

diperlukan kebijakan perumahan dan pemukiman yang lebih menyentuh masyarakat miskin, sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan sehat.

1.1.1. Terbatasnya akses terhadap air bersih dan aman, serta sanitasi.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Air bersih didefinisikan sebagai air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Masyarakat miskin seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan aman. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air, belum terjangkau oleh jaringan distribusi, menurunnya mutu sumber air, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya air bersih dan sanitasi untuk kesehatan.

Kesulitan memperoleh air bersih dan aman umumnya dihadapi oleh penduduk terutama rumah tangga yang tinggal di daerah yang sulit air. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah buruknya sanitasi dan lingkungan permukiman terutama yang tinggal di kawasan kumuh. Kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan mereka terutama anak-anak dan ibu. Selain itu, masyarakat miskin juga kurang memahami pengelolaan sanitasi dan lingkungan hidup sebagai bagian dari perilaku hidup sehat.

Kesulitan dalam mengakses air bersih dan aman, dan sanitasi akan menjadi beban berat bagi masyarakat miskin. Upaya pemenuhan hak dasar atas air bersih dan aman perlu menjadi perhatian terutama dalam penyediaan dan distribusi air bersih, terbangunnya mekanisme subsidi penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin terhadap pentingnya air bersih dan sanitasi.

Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah

Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Masalah tersebut sangat dirasakan oleh petani penggarap yang sering tidak mampu memenuhi kebutuhan subsisten. Kehidupan rumahtangga petani sangat dipengaruhi oleh aspek penguasaan tanah dan kemampuan memobilisasi

anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Tingkat pendapatan rumahtangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian yang secara nyata dikuasai. Oleh sebab itu, meningkatnya jumlah petani gurem dan petani tunakisma mencerminkan kemiskinan di perdesaan. Penguasaan tanah cenderung makin menyempit. Masalah tersebut bertambah buruk dengan struktur penguasaan lahan yang timpang karena sebagian besar petani gurem tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik.

Memburuknya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Kemiskinan mempunyai kaitan erat dengan masalah sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumberdaya alam dan perubahan lingkungan. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan daerah pertambangan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan.

Proses pemiskinan juga terjadi dengan menyempitnya dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat miskin akibat penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. Penyusutan ini disebabkan oleh penebangan hutan yang tidak terkendali, penjarahan hutan, kebakaran, dan konversi untuk kegiatan lain seperti pertambangan, pembangunan jalan, dan permukiman.

Dampak lanjutan dari kerusakan ini adalah terjadinya degradasi lahan yang disebabkan oleh erosi. Selain itu, kerusakan hutan juga berdampak bagi masyarakat miskin dalam bentuk menyusutnya lahan yang menjadi sumber penghidupan, dan terjadinya erosi dan tanah longsor yang menyebabkan semakin berat beban yang mereka tanggung.

Masyarakat miskin nelayan juga menghadapi masalah kerusakan hutan bakau dan terumbu karang. Hal ini berdampak pada rusaknya habitat tempat induk ikan mencari makan dan bertelur. Degradasi lingkungan wilayah pesisir mengakibatkan menurunnya populasi ikan di kawasan perikanan tangkap, dan meningkatnya kesulitan nelayan dalam memperoleh ikan.

Kurangnya keamanan dan ketertiban umum

Masyarakat miskin seringkali menghadapi berbagai tindak kekerasan yang menyebabkan tidak terjaminnya rasa aman. Tindak kekerasan tersebut disebabkan oleh konflik sosial dan ancaman non kekerasan antara lain krisis ekonomi dan penyebaran penyakit menular. Berbagai tindak kekerasan dan non kekerasan tersebut mengancam rasa aman dan menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Terjadinya konflik sosial antar masyarakat desa yang satu dengan lainnya berdampak langsung pada merosotnya taraf hidup masyarakat miskin dan munculnya masyarakat miskin baru. Lemahnya jaminan rasa aman sebagai pemicu terjadinya konflik kekerasan dan non kekerasan menunjukkan lemahnya sistem politik dan pemerintahan. Hal ini erat kaitannya dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralis dan otoriter menjadi pemerintahan desentralis dan demokratis.

Selain itu, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab kerentanan masyarakat miskin. Hal ini juga diperkuat dengan tidak berjalannya penegakan hukum secara adil terhadap pelanggaran korupsi, pelanggaran HAM, dan pelaku pelanggaran kekerasan lainnya. Kurangnya jaminan rasa aman juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas aparat keamanan terutama polisi.

Lemahnya partisipasi

Tidak terpenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin karena tidak tepatnya layanan yang diberikan oleh pemerintah, menyentuh langsung persoalan kapabilitas dasar yang kemudian menghambat mereka untuk mencapai harkat martabat sebagai warganegara. Gagalnya kapabilitas dasar itu sering muncul dalam berbagai kasus, terasimilasinya masyarakat miskin dari kehidupan sosial dan membuat mereka semakin tidak berdaya untuk menyampaikan aspirasinya. Kasus tersebut terjadi sebagai akibat dari proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek dan mengabaikan keterlibatan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan.

Sehingga salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat miskin, atau partisipasi LSM

untuk dapat menyampaikan suara si miskin dalam tahap perumusan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Berbagai kasus pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender

Sumber dari permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya patriarki laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara, dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan, dan sistem distribusi sumberdaya yang bias gender.

Masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender tercermin pada tingginya angka kematian ibu, keluarga berencana dan aborsi tidak aman, ketidakcukupan konsumsi nutrisi khususnya perempuan hamil dan menyusui, pengiriman TKW yang sarat dengan penipuan, eksploitasi, pelecehan, kekerasan seksual, perdagangan terhadap perempuan, dan buruknya sanitasi dan air bersih.

Budaya patriarki yang dilegitimasi oleh negara mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah dan suara perempuan tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Masalah keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik tersebut sangat penting karena produk kebijakan yang netral gender hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang berakibat pada pemiskinan kaum perempuan.

Antisipasi kebijakan kedepan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari program pengentasan kemiskinan, maka pemerintah harus mulai membentuk program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di setiap wilayah. Untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan maka sangat penting untuk mencari alternatif usaha dan mata pencaharian lain di desa, sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya. Karakteristik wilayah kajian memiliki karakteristik yang hampir

sama dalam hal potensi alam, sama-sama berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata. Dari sisi mata pencaharian penduduknya, mayoritas sebagai buruh tani, terutama penduduk yang tergolong miskin.

Berdasarkan hasil survey ditunjukkan bahwa sebagian besar respon masyarakat mengindikasikan bahwa mereka membutuhkan bantuan peminjaman modal bergulir yang dapat disalurkan melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Dengan itu, bantuan tersebut dapat meningkatkan akses penduduk miskin terhadap modal yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan aset yang mereka miliki untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Selanjutnya, sebagian masyarakat miskin di wilayah kajian berpendapat bahwa kebijakan/program belum merespon kebutuhan mereka akan lingkungan tempat tinggal yang sehat.

Berdasarkan uraian di atas, prioritas respon kebijakan penanganan kemiskinan yang paling dibutuhkan oleh penduduk miskin di wilayah kajian (Desa Sesait, Desa Mangkung dan Desa Kotaraja) adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan ekonomi bagi mereka. Strategi anti-kemiskinan ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan akses ke permodalan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Selain itu perlu didukung oleh strategi anti-kemiskinan untuk menyediakan kesempatan kerja melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan yang telah dilatih dan promosi usaha kecil.

KESIMPULAN

Pengembangan sumber daya penduduk miskin di Pulau Lombok secara umum dapat dilakukan melalui pemantapan pada tahap transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan lanjutan melalui perbaikan akses dan ketersediaan infrastruktur pendidikan khususnya bagi wilayah miskin. Selanjutnya pada bidang kesehatan dibutuhkan peningkatan akses kesehatan dan perbaikan kualitas pelayanan di tingkat puskesmas. Selain itu, berdasarkan kedua aspek ini, aspek pendidikan dan kesehatan, dibutuhkan adanya perbaikan dan keseimbangan antara sisi “*supply dan demand*” dengan keberpihakan pada penduduk miskin.

Selanjutnya, berdasarkan aspek akses sumber daya dan infrastruktur wilayah miskin perlu

dipertimbangkan beberapa pendekatan program penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1) perbaikan lingkungan, karena seringkali penduduk miskin merupakan korban sekaligus agen kerusakan lingkungan; 2) meningkatkan akses air bersih serta perbaikan sanitasi bagi penduduk miskin; 3) memperluas akses lahan bagi penduduk miskin; 4) reformasi pertanian dan ekonomi yang berpihak bagi penduduk miskin.

Sutrisno, Lukman (2007) *Kemiskinan Pemberdayaan*. Yogyakarta. Kanisius
Suyanto, Bagong (1995) *Perangkap Kemiskinan: Problem & Strategi Pengentasannya*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
Tim Studi KKP (2004)

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Rosa A and K S Kavi Kumar and (2008) *Multidimensional Poverty and Vulnerability*. Economic and Political Weekly, Vol. 43, Issue No. 20.
- Asselin, Louis-Marie (2009). *Analysis of Multidimensional Poverty Theory and Case Studies*. Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-Being.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2005) *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005*
- BPS NTB (2016)
- Cox, David (2004) "Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia Pacific Region." Makalah disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. 2 Maret 2004.
- Haughton, J and Shahidur R. Khandker (2009) *Handbook on poverty and inequality*. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
- Kuncoro, Mudrajat (2004) *Otonomi Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Latifah, Emmy (2011) *Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Yang Berorientasikan Pada Millenium Development Goals*. Surakarta: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Universitas Sebelas Maret.
- Sahdan, Gregorius (2005) *Menanggulangi Kemiskinan Desa* dalam jurnal Ekonomi Rakyat diakses melalui http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_kel_6.htm pada tanggal 25 April 2007 jam 19.28.